

Kementerian Kesehatan

Direktorat Jenderal Kesehatan Lanjutan

Unit Pelayanan Kesehatan

- **3** Jalan H.R. Rasuna Said Blok X-5 Kavling 4-9 Jakarta 12950
- **6** (021) 5223017
- tttps://www.upk.kemkes.go.id

KEPUTUSAN KEPALA UNIT PELAYANAN PELAYANAN KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN RI NOMOR HK.02.03/D.XLVI/171/2025

TENTANG

PEDOMAN PEMBERIAN KOMPENSASI ATAS PELAYANAN PUBLIK YANG
DIBERIKAN TIDAK SESUAI STANDAR PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN
UNIT PELAYANAN KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA UNIT PELAYANAN KESEHATAN,

Menimbang

- : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri pemberdayaan aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang pedoman Standar Pelayanan, penyelenggara pelayanan publik wajib menyusun dan menetapkan maklumat pelayanan, termasuk memuat kesediaan untuk menerima sanksi dan/atau memberikan kompensasi apabila pelayanan publik yang diberikan tidak sesuai standar;
 - b. bahwa terhadap pelayanan publik yang diberikan tidak sesuai standar, penyelenggara pelayanan publik di lingkungan Unit Pelayanan Kesehatan harus memberikan kompensasi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan hurug b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Unit pelayanan Kesehatan tentang Pedoman Pemberian kompensasi atas Pelayanan Publik yang Diberikan Tidak Sesuai Standar Pelayanan Publik di Lingkungan Unit Pelayanan kesehatan.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Publik (Lembaran Negara Pelayanan Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 - 21. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
 - 32. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Publik tentang Pelayanan (Lembaran Negara 2009 Nomor 215, Republik Indonesia Tahun Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
 - 43. Peraturan Menteri pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Standar pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
 - 54. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 33 Tahun 2019 tentang Panduan Perilaku Interaksi Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian Kesehatan;
 - 65. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Kesehatan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

: KEPUTUSAN KEPALA UNIT PELAYANAN KESEHATAN RI TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN KOMPENSASI ATAS PELAYANAN PUBLIK YANG DIBERIKAN TIDAK SESUAI STANDAR PELAYANAN **PUBLIK** DI LINGKUNGAN UNIT PELAYANAN KESEHATAN.

KESATU

: Menetapkan Pedoman Pemberian Kompensasi atas Pelayanan Publik yang Diberikan Tidak Sesuai Standar Pelayanan Publik di Lingkungan Unit Pelayanan

Kesehatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam keputusan Kepala Unit Pelayanan kesehatan ini.

KEDUA

: Pemberian kompensasi yang diberikan berupa permintaan maaf, dan/bentuk lain yang mengakibatkan pengeluaran pendanaa, disesuaikan dengan kemampuan masing-masing unit penyelenggaran pelayanan publik.

KETIGA

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya, dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 14 Januari 2025

PLT. KEPALA UNIT PELAYANAN KESEHATAN,



NI NENGAH YUSTINA TUTUANITA

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA UNIT PELAYANAN KESEHATAN NOMOR HK.02.02/D.XLVI/171/2025

TENTANG

PEDOMAN PEMBERIAN KOMPENSASI ATAS PELAYANAN PUBLIK YANG DIBERIKAN TIDAK SESUAI STANDAR PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN UNIT PELAYANAN KESEHATAN

PEDOMAN PEMBERIAN KOMPENSASI ATAS PELAYANAN PUBLIK YANG DIBERIKAN TIDAK SESUAI STANDAR PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN UNIT PELAYANAN KESEHATAN

A. PENDAHULUAN

1. Latar belakang

Pelayanan publik merupakan kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.

Penyelenggara pelayanan publik merupakan setiap institusi penyelenggara negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk kegiatan pelayanan publik, dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik. Penyelenggara pelayanan publik berkewajiban menyusun dan menetapkan maklumat pelayanan yang meripakan pernyataan kesanggupan penyelenggara pelayanan publik. Maklumat tersebut memuat pernyataan janji dan kesanggupan untuk melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan publik, pernyataan memberikan pelayanan sesuai dengan kewajiban dan akan melakukan perbaikan secara terus-menerus, dan pernyataan kesediaan untuk menerika sanksi dan/atau memberikan kompensasi apabila pelayanan yang diberikan tidak sesuai standar.

Unit Pelayanan Kesehatan berkomitmen bahwa pelaksanaan pelayana publik dipastikan dilakukan sesuai dengan standar pelayanan publik. Terhadap pelayanan publik yang diberikan tidak sesuai standar,

penyelenggara pelayanan publik di lingkungan Unit Pelayanan kesehatan harus memberikan kompensasi kepada penerima layanan.

2. Tujuan

Penyusuanan Pedoaman Pemberian Kompensasi atas Pelayanan Publik yang Diberikan Tidak Sesuai Standar Pelayanan Publik di Lingkungan Unit Pelayanan kesehatan bertujuan untuk:

- a. sebagai acuan bagi Unit Pelayanan Kesehatan dalam memberikan kompensasi kepada penerima layanan yang mendapatkan pelayanan publik tidak sesuai standar pelayanan publik;
- b. menciptakan budaya pelayanan publik di lingkungan Unit Pelayanan Kesehatan yang prima, transparan, dan efisien;
- c. membangun integritas pegawai Unit Pelayanan Kesehatan;
- d. mencegah terjadinya pengabaian pelayanan publik yang mengakibatkan kerugian negara dan kerugian di Unit Pelayanan Kesehatan;
- e. memastikan pelayanan publik di Unit pelayanan Kesehatan diberikan sesuai dengan standar pelayanan publik.

3. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Pendoman Pemberian Kompensasi atas Pelayanan Publik yang Diberikan Tidak Sesuai Standar Pelayanan Publik di Lingkungan Unit Pelayanan kesehatan terdiri atas:

- a. bentuk pelayanan publik yang diberikan tidak sesuai standar pelayanan yang mungkin terjadi; dan
- b. bentuk kompensasi atas pelayanan publik yang diberikan tidak sesuai standar pelayanan publik secara luring (*on site*).

B. KATEGORI PELAYANAN PUBLIK YANG DIBERIKAN TIDAK SESUAI PELAYANAN PUBLIK

Pelayanan publik yang Diberikan Tidak Sesuai Standar Pelayanan Publik di Lingkungan Unit Pelayanan Kesehatan terdiri atas kategori:

- 1. Ringan;
- 2. sedang; dan
- 3. berat.

C. JENIS PELAYANAN PUBLIK YANG DIBERIKAN TIDAK SESUAI STANDAR PELAYANAN PUBLIK

Pelayanan Publik yang Diberikan Tidak Sesuai Standar Pelayanan Publik di Lingkungan Unit Pelayanan Unit Pelayanan Kesehatan ditentukan berdasarkan:

- 1. ketidaksesuaian waktu;
- 2. ketidaksesuaian biaya;
- 3. ketidaksesuaian prosedur;
- 4. ketidaksesuaian fasilitas; dan
- 5. ketidaksesuaian produk.
- D. BENTUK KOMPENSASI ATAS PELAYANAN PUBLIK YANG DIBERIKAN TIDAK SESUAI STANDAR PELAYANAN PUBLIK

Terhadap pelayanan publik yang diberikan tidak sesuai standar pelayanan publik, diberikan kompensasi dalam bentuk:

- 1. Permohonan maaf, baik secara lisan maupun tertulis;
- 2. Penyediaan air minum;
- 3. Pemberian priorotas pelayanan.

E. MATRIX URAIAN

Identifikasi Bentuk Pelayanan Publik Yang Diberikan Tidak Sesuai Standar Pelayanan Publik Yang Mungkin Terjadi Dan Bentuk Kompensasi Atas Pelayanan Publik Yang Diberikan Tidak Sesuai Standar Pelayanan Secara Luring (*On Site*)

Kategori	Waktu	Biaya	Cara/Prosedur/Kompentensi	Fasilitas	Produk
IDENTIFIKASI JENIS LAYANAN YANG TIDAK MEMENUHI STANDAR PELAYANAN PUBLIK YANG MUNGKIN TERJADI					
Ringan	Waktu pelayananl	. Tidak memberikan	Penjelasan/arahan dari	terdapat fasilitas yang	Kesalahan
	melebihi 30 s.d 60	Informasi secara terbuka	petugas yang tidak jelas dan	tidak lengkap atau	penulisan/salah ketik
	menit dari standar	terkait biaya pelayanan	lengkap sehingga penerima	kurang berfungsi.	misalnya mengenai
	waktu pelayanan	(gratis/ berbiaya	layanan keliru dalam	misalnya air di toilet	identitas penerima
		berdasarkan ketentuan)	memahami prosedur dengan	tidak mengalir/tidak	layanan dalam produk
		yang telah ditetapkan.	catatan akibat hal tersebut	tersedia, kunci pintu	pelayanan
	2	. Terjadi perbedaan	tidak mengakibatkan	toilet tidak berfungsi,	administrasi
		penulisan antara angka	kerugian materil/immateril.	kursi/ruang pelayanan	(Pendaftaran).
		dan huruf pada kuitansi		tidak cukup menampung	
		atau tanda terima	þ	sehingga penerima	
		pembayaran.		layanan	
				menunggu/mengantri	
				untuk mengakses	
				fasilitas tersebut	
				(melebihi 10 s.d 30	
	1			menit).	
BENTUK KOMPENSASI ATAS PELAYANAN PUBLIK YANG TIDAK MEMENUHI STANDAR PELAYANAN PUBLIK					

Kategori	Waktu	Biaya	Cara/Prosedur/Kompentensi	Fasilitas	Produk
Ringan 1.	Menyediakan airl	Pemberi layanan seger a .	Permohonan maaf secara.	Segera melakukanl.	Segera memperbaiki
	minum dan majalah	menyampaikan informasi	lisan oleh pemberi layanan.	pemenuhan dan	produk pelayanan
	baca.	mengenai biaya/tar i .	Mengantar penerima layanan	memperbaiki pada saat	pada hari yang sama
2.	Permohonan maaf	layanan secara terbuka	hingga tempat layanan yang	kejadian tersebut.	saat diketahui terjadi
	secara lisan oleh	kepada penerima layanan.	dibutuhkan. 2.	Permohonan maaf secara	kekeliruan.
	pemberi layanan. 2	Permohonan maaf secara		lisan oleh pembe 2 .	Permohonan maaf
		lisan oleh pemberi		layanan.	secara lisan oleh
		layanan.			pemberi layanan.
Il	DENTIFIKASI JENIS LA	YANAN PUBLIK YANG TIDAK	MEMENUHI STANDAR PELAYA	ANAN PUBLIK YANG MUNGI	KIN TERJADI
Sedang	Waktu pelayanan 1.	Tidak Ramah dalam 1.	Pemberi layanan berperilaku	Terdapat fasilitas yang	Tidak lengkapnya
	melebihi 60 menit	Menyampaikan Informasi	tidak sopan dalam	tidak lengkap atau	pengisian dokumen
	dari standar waktu	PNBP Layanan.	memberikan pelayanan.	kurang berfungsi.	pemeriksaan
	pelayanan.	2.	Pemberi layanan menambah	misalnya air di toilet	mengakibatkan
			atau mengurangi satu	tidak mengalir/tidak	kerugian/ dampak
			prosedur pelayanan tanpa	tersedia, kunci pintu	pada penerima
			dasar sehingga	toilet tidak berfungsi,	layanan.
			mengakibatkan	kursi/ruang pelayanan	
			terganggunya proses	tidak cukup menampung	
		\ \B\',	pelayanan.	sehingga penerima	
	1			layanan	
				menunggu/mengantri	

Kategori	Waktu	Biaya	Cara/Prosedur/Kompentensi	Fasilitas	Produk
				untuk mengakses	
				fasilitas tersebut	
				(melebihi 30 menit).	
	BENTUK KOMPE	NSASI ATAS PELAYANAN PU	JBLIK YANG TIDAK MEMENUH	I STANDAR PELAYANAN PU	JBLIK
Sedang	Permohonan maaf 1.	Memberikan souvenit.	Memberikan prioritas.	Segera melakukan.	Segera memperbaiki
	secara lisan oleh	berupa pulpen.	pelayanan penerima layanan	pemenuhan dan	produk pelayanan
	atasan langsung 2.	Permohonan maaf secara	dikemudian hari (misalnya	memperbaiki fasilitas	pada hari yang sama
	atau yang mewakili.	lisan oleh atasan langsung	tanpa melalui antrian	tersebut dan	saat diketahui terjadi
		atau yang mewakili.	umum).	mendampingi kelompo k .	Permohonan maaf
		2.	Permohonan maaf secara	Difabel atau rentan	secara lisan oleh
			lisan oleh atasan langsung	untuk mengakses	atasan langsung atau
			atau yang mewakili.	fasilitas khusus saat	yang mewakili.
				kejadian tersebut.	
			2.	Permohonan maaf secara	
				lisan oleh atasan	
				langsung atau yang	
				mewakili.	
IDENTIFIKASI JENIS LAYANAN PUBLIK YANG TIDAK MEMENUHI STANDAR PELAYANAN PUBLIK YANG MUNGKIN TERJADI					

Berat	Waktu pelayanan	Anahila nelayanan gratisi	Pemberi Layanan terbukti	Terdanat fasilitas	Terdapat produk	
Borac	melebihi 90 menit		melakukan pemerasan atau		layanan yang rusak	
			•	,		
	dari standar waktu	biaya.	kekerasan secara verbal	berfungsi sebagaiamana	misalnya alat	
	pelayanan.		terhadap penerima layanan.	seharusnya yang	pemeriksaan yang	
		2.	Pemberi layanan terbukti	mengakibatkan	tidak berfungsi	
			tidak sesuai prosedur yang	penerima layanan	dan/atau	
			berakibat kerugian	mengalami luka ringan,	mengakibatkan	
			materil/immaterial bagi	sedang atau berat.	kerugian/dampak	
			penerima layanan.		pada penerima	
					layanan.	
	BENTUK KOMPENSASI ATAS PELAYANAN PUBLIK YANG TIDAK MEMENUHI STANDAR PELAYANAN PUBLIK					
Berat	Permohonan maaf.	Permohonan maaf secara.	Permohonan maaf secara.	Permohonan maaf secaral	Permohonan maaf	
	secara resmi dan	resmi dan tertulis oleh	resmi dan tertulis oleh	resmi tertulis dari	secara lisan oleh	
	tertulis oleh	pimpinan atau yang	pimpinan atau yang	pimpinan.	atasan langsung atau	
	pimpinan atau yang	mewakili	mewakili 2.	Mengantarkan,	yang mewakili.	
	mewakili. 2.	Pimpinan menjamia.	memberikan prioritas	mendamping dar2	Segera memperbaiki	
		proses pembinaan	pelayanan sesuai kebutuhan	membantu mengurus	produk layanan pada	
		internal/sidang kode etik	penerima layanan	apabila diperlukan	saat kejadian tersebut	
		dilakukan sesual.	Pimpinan menjamin proses	rujukan untuk3	Memberikan prioritas	
		ketentuan dan transparan	pembinaan internal/sidang	mendapatkan perawatan	pelayanan penerima	
		serta hasilnya	kode etik dilakukan sesuai	kesehatan.	layanan dikemudian	
		disampaikan kepada	ketentuan dan transparan		hari pada layanan	

	penerima layanan.	serta hasilnya disampaikan	tersebut.
		kepada penerima layanan.	